

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KURIKULUM DI INDONESIA

Annisa Darma Yanti¹, Doni Hendra², Elly Marlina³, Agus Tino Mulio⁴, Mudasir⁵
annisadarmay@gmail.com¹, abinahwa11@gmail.com², ellymarlina02011974@gmail.com³,
agustinomulio119955@gmail.com⁴, mudasir@uin-suska.ac.id⁵
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Untuk memperbaiki mutu pendidikan perlu ditekankan pada perbaikan manajemen kurikulum di sekolah sekolah yang manajemen kurikulum dan pembelajarannya baik diasumsikan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan. Secara berturut-turut kurikulum yang baru memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu dari Kurikulum 1947 yang memperbaiki Kurikulum jaman penjajahan Jepang, Kurikulum 1949, Kurikulum 1958, Kurikulum 1962 atau Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dengan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2007/2008. Serta ada K-13 hingga kurikulum merdeka saat ini.

Kata Kunci: Hukum, Kebijakan, Kurikulum.

ABSTRACT

The curriculum is a system with closely interconnected and mutually supportive components. These components consist of objectives, learning materials, methods, and evaluation. In this system, the curriculum operates towards an educational goal through the cooperation of all its subsystems. To improve the quality of education, it is essential to focus on enhancing curriculum management in schools. Good curriculum and learning management are assumed to enhance students' academic achievements. In Indonesia, there have been several curriculum changes in an effort to improve the quality of education. Successive curricula have been designed to improve upon their predecessors, starting from the 1947 Curriculum, which improved on the Japanese occupation-era curriculum, followed by the 1949 Curriculum, the 1958 Curriculum, the 1962 or 1964 Curriculum, the 1968 Curriculum, the 1975 Curriculum, the 1984 Curriculum, the 1994 Curriculum with the 1999 Curriculum Supplement, the 2004 Curriculum or Competency-Based Curriculum, and the School-Based Curriculum implemented in the 2007/2008 academic year. Additionally, there is the K-13 and the current independent curriculum

Keyword: Law, Policy, Curriculum

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal.

Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum, sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. Dalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya.¹

Untuk memperbaiki mutu pendidikan perlu ditekankan pada perbaikan manajemen kurikulum di sekolah sekolah yang manajemen kurikulum dan pembelajarannya baik diasumsikan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. Adanya sekolah yang mampu di satu pihak, dan ada sekolah yang kurang mampu di pihak lain, dalam menghasilkan lulusan yang berprestasi menunjukkan keragaman kemampuan dalam mengelola kurikulum, SDM dan sumber daya lainnya dalam kegiatan proses pembelajaran. Proses kegiatan manajemen yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran disekolah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.²

Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dengan cara menjamin peningkatan mutu pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dapat berdampak ganda, yaitu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan memperlancar pembangunan di sektor lain.³

Berbagai kebijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan telah ditempuh pemerintah, antara lain berusaha memperbaiki kurikulum dan sistem evaluasi, memperbaiki sarana pendidikan, meningkatkan jumlah dan mutu materi ajar dan alat-alat pelajaran, pelatihan guru dan calon guru, bahkan perubahan undang-undang sistem pendidikan. Namun, sampai saat ini upaya perbaikan mutu pendidikan itu dinilai belum dapat meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Sebagian sekolah, terutama di kota menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan. Secara berturut-turut kurikulum yang baru memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu dari Kurikulum 1947 yang memperbaiki Kurikulum jaman penjajahan Jepang, Kurikulum 1949, Kurikulum 1958, Kurikulum 1962 atau Kurikulum

¹ Ibrahim Nasby, "Manajemen Kurikulum : Sebuah Kajian Teoritis", *Jurnal Idaarah*, Vol. 1, No. 2, (2017), Hlm. 318

² Bafadal & Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), Hlm. 40

³ Mohamad Zaini, *Manajemen Kurikulum Terintegrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 5

1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dengan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2007/2008. Berdasarkan pengalaman selama ini terungkap bahwa letak kelemahan kurikulum di Indonesia terutama pada bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga memberikan nilai tambah yang nyata bagi peningkatan mutu Pendidikan.⁴

Dalam penyelenggaraan kurikulum di Indonesia diperlukan adanya badan hukum yang menjadi acuan segala proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Oleh sebabnya dalam makalah ini akan diuraikan secara jelas apa saja landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan kurikulum yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah bentuk dari penelitian yang berfokus pada perpustakaan. Istilah "penelitian perpustakaan" atau sering juga disebut "studi perpustakaan" merujuk pada serangkaian kegiatan yang meliputi metode pengumpulan data dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan memproses materi penelitian.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan masalah dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Pendekatan kualitatif menjadi populer, terutama dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi, juga dalam bidang Pendidikan.⁶

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang terkait dengan tema dan diskusi dalam penelitian ini, peneliti segera memulai proses analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Konten dan Analisis Deskriptif. Dalam proses ini, langkah pertama adalah mengklasifikasikan data. Analisis data juga disebut pengolahan data dan interpretasi data. Analisis data merupakan serangkaian aktivitas pengkajian, pengelompokan, penataan sistematis, interpretasi, dan verifikasi data, sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian aktivitas keseluruhan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Kebijakan Kurikulum Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Sebagaimana yang tercantum dalam UU SISDIKNAS bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

⁴ Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah / Madrasah, (Mmbs / M)* (Jakarta : Ceqm, 2004)

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), V.

⁷ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

tertentu.⁸

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 36 menyebutkan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa “kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa”. Selanjutnya pada ayat 2 ditegaskan bahwa “sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan SKL, dibawa supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bawah pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA.⁹

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Pasal 1 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, “implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014”.

Sementara itu, Pasal 2 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 mengatur bahwa implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: Pertama, pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kedua, pedoman pengembangan muatan lokal. Ketiga, pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, pedoman umum pembelajaran. Kelima, pedoman evaluasi kurikulum. Proses implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah juga tidak begitu berbeda dengan proses implementasi yang berlangsung di Sekolah Dasar, yakni merujuk pedoman implementasi yang dikembangkan oleh Permendikbud tersebut, meskipun pada beberapa aspek dilakukan penyesuaian, seperti di antaranya pada aspek standar isi mata pelajaran pendidikan agama islam, mata pelajaran bahasa arab dan pengadaan buku ajar serta buku pegangan bagi guru.¹⁰

Dasar pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Surat Keputusan Menteri ini menetapkan keputusan, sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- b. Pengembangan kurikulum mengacu pada Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan/revisi, dan Kurikulum Merdeka.
- c. Kurikulum mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

⁸ Kadek Sandi Arsana, Dkk, “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pembelajaran Akuntansi Di Smk N 1 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014”, *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 1 (2014)

⁹ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm. 20

¹⁰ Andi Prastowo, “Paradigma Baru Madrasah Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013”, *Jurnal Pendidikan Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 3, No. 1, (2014), Hlm. 95

- d. Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- e. Kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
6. Kurikulum Merdeka diatur di lampiran SK Mendikbudristek.
- f. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi Kurikulum Merdeka diatur di lampiran II SK ini.
- h. Peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan menggunakan Kurikulum Merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linieritas sesuai kedua lampiran SK ini.
- i. Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan mulai kelas I sampai kelas XII.¹¹

Sementara landasan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum terdiri dari 7 aspek yakni : landasan filosofis, landasan psikologis, landasan Pendidikan, landasan sosiologis, landasan ekonomi, landasan sosial budaya dan landasan teknologi.

- a. Landasan Filsafat, melakukan kajian sampai ke akar-akarnya tentang hakikat manusia yang mencakup pandangan hidup. Secara filsafat ditentukan nilai-nilai luhur dan digambarkan manusia yang ideal menurut pandangan masyarakat.
- b. Landasan Psikologi, berkenaan dengan studi tentang tingkah laku manusia, psikologi mempelajari interaksi antara individu dan lingkungannya. Psikologi memberikan sumbangan penting terhadap ilmu manajemen.
- c. Landasan Pendidikan, merupakan keseluruhan upaya yang dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan, bimbingan, untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional, institusional, kurikulum, instruksional)
- d. Landasan Sosiologi, obyek studi sosiologi adalah masyarakat dan gejala-gejala sosial serta sistem sosial secara keseluruhan. Studi sosiologi mengembangkan berbagai teori, dan masing-masing teori mengajukan konsep yang berbeda.
- e. Landasan Ekonomi, Ilmu ekonomi sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen, bahkan ekonomi memberikan sumbangan yang sangat berharga, bagi pengayaan teori-teori dan konsep-konsep manajemen. Masalah seperti perencanaan ketenagaan, kesempatan kerja, manajemen industri, peningkatan produktivitas, cost benefits analysis dan cost effectiveness analysis, masalah pemasaran, dan sebagainya.
- f. Landasan Sosial budaya, merupakan lingkungan nonpersonal berupa obyek dan nilai. Lingkungan kultural dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, baik secara individual maupun kelompok.
- g. Landasan Teknologi, teknologi bukan hanya sebagai penerapan ilmu kealaman (science), tetapi juga merupakan proses dan alat untuk melakukan perbaikan generasi, yakni proses manajemen.¹²

¹¹ Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhruddin, Hamdani, Suprapno, *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, (Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm. 19

¹² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 30-32

A. Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Di Indonesia

Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian. “Kebijakan itu adalah masa pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi”.¹³

1. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun.
2. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Sejarah mencatat, pada masa Orde lama kurikulum telah mengalami pergantian sebanyak 3 kali. Pertama, pada tahun 1947 kurikulum pertama yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran. Kedua, pada tahun 1952 kurikulum ini disebut dengan Rentjana Terurai. Ketiga, di tahun 1964, Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan yang berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistic, keterampilan dan jasmani atau Pancawardhana.¹⁴

a. Rencana pelajaran 1947

Kurikulum ini lebih dikenal dalam bahasa Belanda yaitu leer plan, yang memiliki arti Rencana pelajaran. Penyusunan kurikulum ini bersifat politis, dari model pendidikan Belanda menuju ke kepentingan nasional. Karena suasana bangsa saat itu masih dalam semangat juang mempertahankan kemerdekaan, maka Rencana Pelajaran lebih terpusat pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang pancasilais.¹⁵

b. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Di tahun 1952 kurikulum di Indonesia lebih disempurnakan. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran, kemudian diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri khas kurikulum 1952 ini adalah isi pelajarannya yang harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, dibentuk Kelas Masyarakat. Kelas Masyarakat adalah sekolah khusus bagi lulusan Sekolah Rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Di dalam kelas masyarakat diajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan.¹⁶

c. Kurikulum 1968

Perubahan yang mencolok pada Kurikulum 1968 ini ada pada struktur kurikulum pendidikannya, dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini adalah wujud dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan dari penerapan kurikulum 1968 adalah menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia yang dan agamis. Sehingga pendidikan lebih ditujukan pada aktivitas untuk memperkuat kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.¹⁷

¹³ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)

¹⁴ Hamalik, O, *Pengembangan Kurikulum, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. (Mandar Maju, 1990)

¹⁵ Wahyuni, F. “Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)”. *Jurnal Al-Adabiya*, (2015), Hlm 302

¹⁶ Setiana, D. S., & Nuryadi. *Kajian Kurikulum Sekolah Dasar Dan Menengah*, (Jakarta : Gramasurya, 2020)

¹⁷ Insani, F. D. “Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini”. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (2019), 43–64

Pada masa Orde Baru, kurikulum mengalami pergantian sebanyak 4 kali. Pertama, pada tahun 1968 kurikulum ini diberi nama kurikulum 1968 dari hasil evaluasi pancawardhana disempurnakan menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kedua, pada tahun 1975 kurikulum ini diberi nama kurikulum 1975 yang terfokus pada pengembangan sistem Instruksional (PPSI). Ketiga, tahun 1984 diberi nama kurikulum 1984 terfokus pada pengembangan skill dengan model yang disebut CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau Student Active Learning (SAL). Keempat, ialah tahun 1994 yang dikenal dengan kurikulum 1994.¹⁸

- a. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut : Berorientasi pada tujuan. Pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan. Kedua Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Ketiga, Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Keempat Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Dan yang terakhir, Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsangjawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.¹⁹
- b. Kurikulum 1984.

Pada Kurikulum 1984 mengangkat process skill approach, yaitu mengutamakan pendekatan proses, namun perihal tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga dikenal sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Disini siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Dimulai dengan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).²⁰

- c. Kurikulum 1994

Sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dibuatlah Kurikulum 1994 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini memiliki dampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan berubahnya sistem semester ke sistem caturwulan. Sistem caturwulan pererapannya dalam satu tahun dibagi menjadi tiga tahap, dengan harapan memberi kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan materi pelajaran cukup banyak. Tujuannya adalah menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.²¹

Dalam kurikulum 1994 terdapat perpaduan tujuan dan proses yang belum berhasil. Hal ini dikarenakan beban belajar siswa dinilai terlalu berat, mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal menyesuaikan dengan kebutuhan daerah

¹⁸ Somantrie, H. "Kompetensi Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 6, (2010), Hlm. 684–698

¹⁹ Safitri, R., & Purwaningsih, S. "Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968- 1998". *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, (2016), Vol. 4, No. 3, Hlm. 644

²⁰ Supriyanta, E. "Pelaksanaan Pembelajaran Cbsa Dalam Usaha Meningkatkan Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Bhina Karya Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (2015), Hlm. 52–64

²¹ Ritonga, M. "Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period". *Bina Gogik*, Vol. 5, No. 2, Hlm. 1–15

masingmasing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Sehingga kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat.²²

3. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang.

- a. Kurikulum 2004 (KBK) Kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan.
- b. Kurikulum 2006 (KTSP) Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada.
- c. Kurikulum 2013 Pada tahun ajaran baru 2013/2014 pemerintah menetapkan diberlakukannya kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP dan melanjutkan pengembangan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sesuai amanat UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik, mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran.

Usaha yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Konsep baru yang muncul dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karenanya, kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi dan pelaksanaannya tetap berorientasi pada 8 standar nasional Pendidikan.²³

Penyempurnaan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 sebenarnya bukan suatu perubahan yang drastis. Implementasi kurikulum 2013 juga hampir mirip dengan kurikulum KTSP, yaitu menggunakan prinsip yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreatifitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika; dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan,

²² Agung, L. *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Yogyakarta : Ombak, 2015)

²³ Wiji Hidayati, Syaefudin, Umi Muslimah, *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan)*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2021), Hlm. 23

dan mencipta. Mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah.²⁴

Merdeka belajar menjadi sebuah suatu terobosan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadikan proses pembelajaran di setiap sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak positif merdeka belajar ditujukan kepada guru, peserta didik, dan bahkan wali murid. Pembelajaran merdeka belajar memutamakan minat dan bakat peserta didik yang dapat memupuk sikap kreatif dan menyenangkan pada peserta didik. Kurikulum merdeka belajar menjawab semua keluhan pada sistem pendidikan. Salah satunya yaitu nilai peserta didik hanya berpatokan pada ranah pengetahuan.

Di samping itu, merdeka belajar membuat guru lebih merdeka lagi dalam berpikir sehingga diikuti oleh peserta didik. Saat percaya terhadap kemerdekaan guru dan kemerdekaan belajar, maka akan bersinggungan dengan banyak hal, salah satunya kemerdekaan dalam proses belajar. Proses belajar butuh kemerdekaan karena kemerdekaan harus melekat pada subjek yang melakukan proses belajar anak ataupun orang dewasa. Termasuk melibatkan dukungan banyak pihak.²⁵

Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ingin menciptakan suasana belajar yang happy dan kondusif bagi peserta didik. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya hebat menghafal namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Konsep merdeka belajar digagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas²⁶

B. Peranan dan Kedudukan Kurikulum Dalam Pendidikan

Kurikulum memang memiliki posisi yang sangat strategis khususnya pada lembaga pendidikan sekolah. Kurikulum adalah syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tanpa kurikulum yang jelas, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah akan kacau dan tanpa tujuan yang jelas. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran (belajar mengajar). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu bidang studi, yang dikenal oleh ahli atau spesialis kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoretis bagi

²⁴ Lambang Subagiyo, Safrudiannur, "Implementasi Kurikulum 2013 Pada Jenjang Sd, Smp, Sma Dan Smk Di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014", *Jurnal Penelitian Pancaran*, Vol. 3, No. 4, (2014), Hlm. 131-144,

²⁵ Ruhaliah, Dkk., "Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran "Merdeka Belajar" Bagi Guru Bahasa Sunda Di Kota Sukabumi", *Dimasatra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1 (2020).

²⁶ M. Saleh. *Merdeka Belajar Di Tengah Pandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Hardiknas, (2020), Hlm. 51-56.

pengembangan kurikulum sebagai institusi Pendidikan.²⁷

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum terkait dengan komponen-komponen yang mengarah pada tujuan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam pendidikan. Ada tiga peran kurikulum, yaitu : peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluative.²⁸

- a. Peran konservatif; menekankan bahwa kurikulum harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini dikaitkan dengan era global sebagai akibat kemajuan IPTEK yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya-budaya asing menggrogoti budaya-budaya lokal. Melalui pesan konservatif, kurikulum berperan menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga mampu mempengaruhi dan membina perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungannya.
- b. Peran kreatif; menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang agar pendidikan tidak tertinggal. Maksudnya, apa yang diajarkan di madrasah pada akhirnya akan bermakna dan relevan dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat.
- c. Peran kritis dan evaluatif; adalah peran dimana kurikulum tidak hanya mewariskan budaya-budaya masa lalu, namun disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini secara selektif. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan serta aktif dalam kontrol dan filter sosial.

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral, sebagai pusat proses pendidikan sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan tercapai tujuan dengan baik karena kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep dan landasan bagi institusi Pendidikan.

KESIMPULAN

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan. Secara berturut-turut kurikulum yang baru memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu dari Kurikulum 1947 yang memperbaiki Kurikulum jaman penjajahan Jepang, Kurikulum 1949, Kurikulum 1958, Kurikulum 1962 atau Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dengan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2007/2008. Serta ada K-13 hingga kurikulum merdeka saat ini. Semua itu bertujuan untuk

²⁷ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8

²⁸ Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 10

mewujudkan Pendidikan Indonesia yang berkualitas dan menghasilkan sumberdaya manusia yang hebat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, L. Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, (Yogyakarta : Ombak, 2015)
- Andi Prastowo, “Paradigma Baru Madrasah Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013”, Jurnal Pendidikan Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, No. 1, (2014)
- Bafadal & Ibrahim, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2014)
- Hamalik, O, Pengembangan Kurikulum, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya. (Mandar Maju, 1990)
- Ibrahim Nasby, “Manajemen Kurikulum : Sebuah Kajian Teoritis”, Jurnal Idaarah, Vol. 1, No. 2, (2017), Hlm. 318
- Insani, F. D. “Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini”. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, Vol. 8, No. 1, (2019)
- Kadek Sandi Arsana, Dkk, “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pembelajaran Akuntansi Di Smk N 1 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014”, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 1 (2014)
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhruddin, Hamdani, Suprapno, Pengembangan Kurikulum Merdeka, (Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Lambang Subagiyo, Safrudiannur, “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Jenjang Sd, Smp, Sma Dan Smk Di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014”, Jurnal Penelitian Pancaran, Vol. 3, No. 4, (2014)
- M. Saleh. Merdeka Belajar Di Tengah Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Hardiknas, (2020)
- Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Mohamad Zaini, Manajemen Kurikulum Terintegrasi, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020)
- Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)
- Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2006)
- Ritonga, M. “Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period”. Bina Gogik, Vol. 5, No. 2
- Ruhaliyah, Dkk., “Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran “Merdeka Belajar” Bagi Guru Bahasa Sunda Di Kota Sukabumi”, Dimasatra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (2020)
- Safitri, R., & Purwaningsih, S. “Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968- 1998”. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, (2016)
- Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Setiana, D. S., & Nuryadi. Kajian Kurikulum Sekolah Dasar Dan Menengah, (Jakarta : Gramasurya, 2020)
- Somantrie, H. “Kompetensi Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 6, (2010)
- Sukiman, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Supriyanta, E. “Pelaksanaan Pembelajaran Cbsa Dalam Usaha Meningkatkan Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Bhina Karya Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014”. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, (2015)

- Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah / Madrasah, (Mmbs / M) (Jakarta : Ceqm, 2004)
- Wahyuni, F. “Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)”. Jurnal Al-Adabiya, (2015)
- Wiji Hidayati, Syaefudin, Umi Muslimah, Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan), (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2021)
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira De Linguística Aplicada (Makasar: Syakir Media Press, 2021), V.